

SETELAH Pilkada Serentak 2016, kita seakan dihentak realita. Ada banyak pemimpin daerah yang membuat ternganga. Mulai bupati yang marah-marah saat memimpin upacara hingga tertangkap tangan sedang pesta narkoba. Tak pelak, semuanya sepakat, kualitas pemimpin daerah dalam Pilkada Serentak 2017 mendatang menjadi sangat penting artinya.

Terlepas apakah kandidat itu perseorangan atau dari partai politik terdapat hal serius yang harus diperhatikan: kualitas calon kepala daerah. Kita tidak bisa lagi memilih calon kepala daerah 'gadungan', 'kacangan' alias 'karbitan'. Terlalu banyak risiko yang harus ditanggung masyarakat selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah yang 'gadungan', 'kacangan' ataupun 'karbitan' tersebut.

Kita harus memilih calon kepala daerah yang berkualitas. Tiga hal untuk melihatnya. *Pertama*, kualitas sendiri bisa kita lihat dari rekam jejak calon yang hendak diusung oleh masyarakat atau partai politik. Kita tidak mempertaruhkan daerah pada orang yang tidak jelas rekam jejaknya sekalipun dianggap populer, dianggap tokoh karena keturunan tokoh politik atau tokoh masyarakat.

* Bersambung hal 7 kol 1

KAMIS PAHING, 7 APRIL 2016 (28 JUMADILAKIR 1949)

Kualitas

Kedua, selain rekam jejak kandidat, mengukur kualitas bisa dilakukan dengan debat publik untuk beradu konseptual tentang rencana yang akan dilakukan sebagai blue print ketika memimpin daerah. Memang rencana blue print membangun daerah bisa dibuat oleh tim sukses atau ndandakke alias order orang yang ahli dalam bidang tertentu terutama terkait tata kelola pemerintahan. Tetapi model kandidat yang orderan semacam ini akan dapat kita ketahui pada saat presentasi dan debat publik. Apakah menguasai ataukah hanya copy paste atas arahan mentor, publik akan dapat menilainya.

Oleh sebab itu, debat publik jangan kita anggap sebagai 'pengadilan publik', tetapi semacam uji kelayakan di hadapan masyarakat yang akan dipimpin. Debat publik tidak perlu di hadapan para anggota dewan yang terlalu banyak kepentingan politik individu selain kepentingan politik partainya. Karenanya debat publik lebih dilakukan oleh masyarakat nonpartai politik.

Ketiga, selain debat publik, untuk mendapatkan

kandidat kepala daerah berkualitas dapat juga dilakukan dengan model menilai. Apakah kandidat semacam 'politisi kutu loncat' ataukah memang memiliki dedikasi politik, dedikasi membangun kultur politik yang sehat, nonkekerasan serta nonsektarian. Hal ini juga dapat kita lihat dari partai pengusung serta kelompok masyarakat pendukungnya.

Jika kandidat merupakan 'politisi kutu loncat', sebenarnya tidak bisa kita berharap banyak dalam menciptakan kultur politik yang beradab. 'Politisi kutu locat' adalah sosok politisi yang hanya ingin menguntungkan dirinya, partainya serta kelompoknya bukan masyarakat luas. 'Politisi kutu loncat' juga tidak bisa diharapkan untuk memimpin daerah dengan kultur yang sehat, demokratis, transparan atau berkeadilan. Sebab ia akan terus di bawah bayang-bayang partai baru sebagai pengusung.

Oleh sebab itulah, menghadapi Pilkada Serentak 2017 ini harus benar-benar memperhatikan kualitas kandidat. Jangan sampai kita memilih kandidat hanya karena kedekatan emosional kesamaan partai, etnik, agama, organisasi,

maupun kesamaan profesi. Kita harus memilih calon kepala daerah yang kita lihat secara objektif memiliki kemampuan sebagai pemimpin, menjadi manager, teladan dalam hidup sehari-hari dan bermasyarakat.

Pemimpin berkualitas pada Pilkada 2017 haruslah kita lihat dari rekam jejak sebelum menjadi kandidat. Apakah berlaku adil, bijaksana, tidak sombong, angkuh, nondiskriminatif, pro-kaum dhuafa, pro-kaum miskin? Ataukah pendukung perilaku politik kaum barbarian dan kaum hippies. Kriteria semacam sangat diperlukan agar kita tidak salah memilih pemimpin.

Kita berharap Pilkada 2017 ini mampu menciptakan para pemimpin daerah yang berkualitas secara personal, sosial, politik, kultural maupun managerial. Dengan begitu kita tidak menyerahkan daerah kepada para cukong ekonomi, blater politik, serta bunglon politik yang berkeliaran di arena politik Pilkada Indonesia.

(Penulis adalah Sosiolog Fisipol UMY)-d